

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan adalah hubungan di mana satu orang atau lebih (*principal*) memerintahkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu layanan (Ichsan, 2013). Dalam teori keagenan, prinsipal bertindak sebagai orang yang memberi perintah sedangkan agen bertindak sebagai orang yang melaksanakan perintah.

Dalam penelitian ini, pemerintah bertindak sebagai prinsipal sedangkan perusahaan bertindak sebagai agen. Pemerintah memerintahkan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di sisi lain, perusahaan mengutamakan kepentingannya dengan memaksimalkan keuntungan perusahaan. (Asri dan Suardana, 2016).

Teori keagenan dapat memecahkan masalah keagenan yang terkait dengan hubungan keagenan. Masalah keagenan terjadi jika perbedaan antara para pihak tidak sejalan, di satu sisi prinsipal ingin meningkatkan kompensasi untuk meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan agen ingin mengurangi biaya pajak untuk memaksimalkan keuntungan.

##### 2.1.2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan adalah teori yang menjelaskan siapa yang dibutuhkan masyarakat melakukan tugasnya ((Freeman & Reed, 1983) melakukan

bisnis tidak berjalan dengan lancar dan efisien tanpa dukungan pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan mencerminkan Variabel CSR, Struktur Modal dan Biaya Operasional. CSR dalam bisnis memantau aspirasi pemangku kepentingan, karena pemangku kepentingan tidak hanya peduli dengan kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga dalam kondisi non keuangan. Kegiatan CSR perusahaan lebih baik semakin banyak pemangku kepentingan yang memberikan dukungan kepada perusahaan. Kondisi Struktur Modal juga Biaya Operasional yang baik juga penting untuk memenuhi permintaan informasi perusahaan yang diminta oleh pihak yang berkepentingan.

### **2.1.3. Agresivitas Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak adalah tindakan yang rentan dilakukan oleh perusahaan besar di seluruh dunia. Hlaing (2012) mendefinisikan Agresivitas Pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam upaya untuk mengurangi tarif pajak efektif. Agresivitas pajak merupakan tindakan yang rentan terhadap perusahaan besar dan kecil di seluruh dunia dan menjadi masalah yang menarik bagi masyarakat. Lanis dan Grant (2012) mendefinisikan Agresivitas Pajak sebagai kegiatan manajerial yang dilakukan melalui rencana pajak dengan memanipulasi penghasilan kena pajak itu baik secara legal atau ilegal. Secara umum, tindakan agresivitas pajak dapat dikatakan sebagai cara bagi perusahaan untuk mengurangi beban penghasilan kena pajak mereka baik dengan *Tax Avoidance* atau *Tax Evation* (Frank et al, 2009).

*Tax Avoidance* adalah cara bagi organisasi untuk memanfaatkan kelemahan yang ada dalam pedoman dan peraturan hukum perpajakan. Sedangkan *Tax Evasion* adalah teknik yang digunakan oleh instansi untuk menyembunyikan skenario yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan peraturan Perpajakan (Pohan, 2011).

Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari tindakan pajak agresif adalah organisasi dapat menyimpan biaya pada beban pajak sehingga pendapatan yang diperoleh perusahaan menjadi lebih banyak dan pendapatan besar ini hanya akan berdampak pada operasional masa depan (Suyanto, 2012). Sedangkan kerugian yang diperoleh badan usaha pada saat melakukan tindakan pajak agresif adalah badan tersebut mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda dan penurunan harga saham jika terbukti pengusaha melakukan tindakan agresif pajak (Kartika & Martani, 2010). Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya kemungkinan penerimaan negara dari sektor pajak.

#### **2.1.4. Corporate Social Responsibility**

##### **2.1.4.1. Pengertian Corporate Social Responsibility**

Menurut Suharto (2007), *Corporate Social Responsibility* adalah operasi bisnis yang mampu meningkatkan keuntungan finansial perusahaan untuk pembangunan sosial serta ekonomi dan berkelanjutan. Sebuah konsep yang banyak dibahas oleh para ahli, yang memiliki berbagai macam definisi namun memiliki makna yang sama. Tanggung Jawab Sosial perusahaan adalah dedikasi organisasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk

tingkatkan gaya hidup terbaik dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat sekitar, dan masyarakat di umumnya. Definisi ini pada dasarnya dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian atau seluruhnya yang memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Perusahaan harus bisa mengendalikan operasi perusahaannya dengan menggunakan produksi yang berorientasi pada produk secara positif bagi masyarakat dan lingkungan (Hadi, 2011).

Berbagai cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjalankan program CSR, mulai dari perencanaan hingga implementasinya yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Susiloadi, 2008). CSR juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan menjadi lebih unggul dalam persaingan dalam mendapatkan keuntungan. Begitu sebuah perusahaan berhasil menerapkan CSR secara efektif maka perusahaan pesaing akan terpaksa untuk terlibat dalam aktivitas CSR, karena jika perusahaan pesaing tidak menerapkan CSR maka perusahaan pesaing terancam kehilangan loyalitas konsumen. Lanis dan Grant (2012) menyatakan bahwa CSR dianggap sebagai elemen kunci dalam pencapaian dan kelangsungan hidup perusahaan.

#### **2.1.4.2. Pengukuran Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Nurlala (2019) pengukuran pengungkapan CSR yang dilakukan sebagai berikut :

$$CSRI_i = \frac{\sum xy_i}{N_j}$$

Keterangan :

CSRI<sub>i</sub> : *Corporate Social Responsibility Index* Perusahaan

$\sum xy_i$  : Total angka atau skor yang diperoleh masing-masing perusahaan  
 Dummy variabel 1 = jika item diungkapkan; 0 = jika item tidak  
 Diungkapkan.

N<sub>j</sub> : Jumlah kriteria pengungkapan CSR untuk perusahaan.

Pendekatan untuk menghitung CSR menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan dalam setiap laporan tahunan masing-masing akan diberi nilai 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan. Model Indikator GRI yang digunakan dalam penelitian ini adalah GRI G4.

## **2.1.5 Struktur Modal**

### **2.1.5.1 Pengertian Struktur Modal**

Menurut (Subranyam & Wild, 2011), Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif berbagai sumber pendanaan. Stabilitas keuangan perusahaan dan resiko gagal melunasi utang bergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan jumlah berbagai asset yang dimiliki perusahaan.

Tingkat finansial struktur modal perusahaan dapat mendeskripsikan risiko keuangan perusahaan. Hal ini ditimbulkan karena struktur modal merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung dengan kreditur dalam

membayai aset perusahaan. Penambahan jumlah utang akan menyebabkan munculnya beban bunga yang harus dibayar perusahaan, komponen beban bunga akan mengurangi untung sebelum kena pajak perusahaan. Sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan berkurang (Adelina, 2012). Tujuan dari struktur modal yaitu untuk membuat perbandingan yang paling tepat dan paling menguntungkan antara utang dan modal usaha dari segi keuangan dan dari segi utang (Prasetya, Tommy, & Saerang, 2014).

#### **2.1.5.2 Komponen Struktur Modal**

Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri dari dua komponen, yakni hutang jangka panjang dan modal sendiri (Warsono, 2003). Komponen tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Hutang Jangka Panjang (*Long Term Debt*), Hutang jangka panjang meliputi pinjaman dari bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu jangka panjang lebih dari 12 bulan. Pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka (pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan) dan penerbitan obligasi (hutang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi, dalam surat obligasi ditentukan nilai nominal, bunga per tahun, dan jangka waktu pelunasan obligasi tersebut).
- b. Modal Sendiri (*Equity*), Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo.

Ada dua sumber utama dari modal sendiri yaitu modal saham preferen dan modal saham biasa, sebagai mana dijelaskan sebagai berikut:

a. Modal saham preferen, Saham preferen memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa yang menjadikannya lebih senior atau lebih diprioritaskan dari pada pemegang saham biasa. Oleh karena itu, perusahaan tidak memberikan saham preferen dalam jumlah yang banyak.

b. Modal saham biasa

Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang menginvestasikan uangnya dengan harapan mendapat pengembalian dimasa yang akan datang. Pemegang saham biasa terkadang disebut pemilik residual sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dan asset telah dipenuhi.

### **2.1.6. Biaya Operasional**

#### **2.1.6.1 Pengertian Biaya Operasional**

Menurut (Jusup Alharyono, 2003) Biaya operasional adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan perusahaan melainkan berhubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Biaya operasional merupakan biaya yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan, pengeluaran dari biaya operasional itu akan mempengaruhi pajak karena salah satu unsur yang dijadikan pengurang adalah biaya penjualan, promosi, serta administrasi. Biaya operasional yang besar dapat juga menjadi indikasi besarnya ukuran dari perusahaan karena dalam biaya operasional menyangkut unsur biaya penyusutan untuk aktiva, biaya gaji tenaga kerja, serta

biaya-biaya lain. Adapun rumus menghitung biaya operasional Menurut Mia Lasmi Wardiyah (2017:30) adalah sebagai berikut:

$$\text{Biaya Operasional} = \text{Biaya Penjualan/Pemasaran} + \text{Biaya Administrasi umum}$$

Adapun penjelasan dari rumus biaya operasional adalah sebagai berikut:

1. Biaya penjualan: biaya - biaya yang terkait langsung dengan aktivitas toko atau aktivitas yang mendukung operasional penjualan barang dagangan.
2. Biaya umum dan administrasi: dikeluarkan dalam rangka mendukung aktivitas urusan kantor (administrasi) dan operasi umum.

#### **2.1.6.2 Jenis-jenis Biaya Operasional**

Biaya operasional digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Adapun jenis dari biaya masing-masing tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1). Biaya penjualan

Termasuk dalam biaya penjualan adalah:

- a. Gaji karyawan penjualan
- b. Biaya pemeliharaan bagian penjualan
- c. Biaya perbaikan biaya penjualan
- d. Biaya penyusutan peralatan bagian penjualan
- e. Biaya penyusutan gedung bagian penjualan

- f. Biaya listrik bagian penjualan
  - g. Biaya telepon bagian penjualan
  - h. Biaya asuransi bagian penjualan
  - i. Biaya perlengkapan bagian penjualan
  - j. Biaya iklan
  - k. Biaya lain-lain
- 2). Biaya administrasi dan Umum
- a. Gaji karyawan kantor
  - b. Biaya pemeliharaan kantor
  - c. Biaya perbaikan kantor
  - d. Biaya penyusutan peralatan kantor
  - e. Biaya penyusutan gedung kantor
  - f. Biaya listrik kantor
  - g. Biaya telepon kantor
  - h. Biaya asuransi kantor
  - i. Biaya perlengkapan kantor
  - j. Biaya lain-lain

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, struktur modal, dan biaya operasional terhadap agresivitas pajak penghasilan badan. Penelitian-penelitian mengenai pengaruh antar variable-variabel tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Berikut beberapa objek penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama dan Tahun Penelitian  | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|----|----------------------------|--|---|
| 1  | Yasmin Ester<br>(2020)     | Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Mediasi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property dan Real Estate. | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur Modal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak |
| 2  | Yohannes Supriyanto (2021) | Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> ,   | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya Operasional  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020   | berpengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak   |
| 3 | M Mustika, V Ratnawati, dan A Silfi (2017) | <i>Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</i> | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak |
| 4 | Hamdi S (2018)                             | Pengaruh Struktur Modal Terhadap  | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | <p>Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015</p> | <p>bahwa Struktur Modal berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak</p>  |
| 5 | <p>Lanis, R.,<br/>Richardson, G.<br/>(2015)</p> | <p><i>Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance?</i></p>   | <p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak</p> |
| 6 | <p>Novia Bani<br/>Nugraha (2015)</p>            | <p>Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i>, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak</p>   | <p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif</p>                      |

|   |                             |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|
|   |                             |  | signifikan terhadap Agresivitas Pajak  |
| 7 | Juniati Gunawan (2017)      | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Pajak   | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak |
| 8 | Lidya Christianti (2020)    | Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Biaya Operasional dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya Operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak           |
| 9 | Sari, D., & Tjen, C. (2017) | <i>Corporate Social Responsibility</i> Disclosure,   | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Corporate</i>  |

|    |                |   |  |
|----|----------------|---|--|
|    |                | Environmental Performance, and Tax Aggressiveness   | <i>Social Responsibility</i><br>memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak  |
| 10 | Yoehana (2013) | Analisis Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2011 | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh negative signifikan terhadap Agresivitas Pajak |

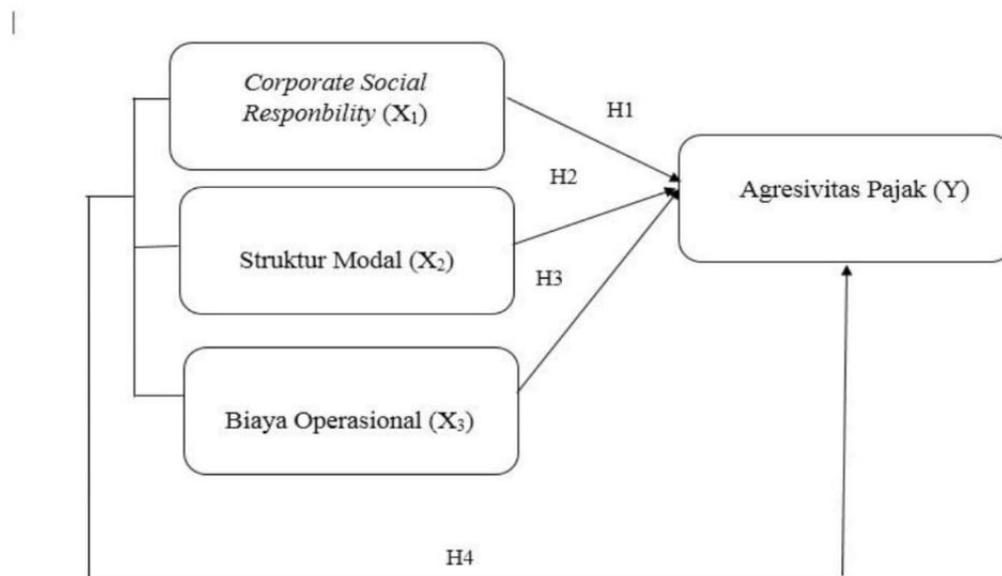
Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, yang membedakan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah variabel, jenis perusahaan dan tahun yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana *Corporate Social Responsibility*, Struktur Modal dan Biaya Operasional dapat memberikan pengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antar variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun yang menjadi variable bebas dalam penelitian ini ialah *Corporate Social Responsibility*, Struktur Modal, dan

Biaya Operasional dan yang menjadi variabel terikatnya adalah Agresivitas Pajak Badan Penghasilan.

Mengenai pemaparan diatas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 2.1**  
**Skema Bagan Kerangka Pikir**

## 2.4. Hipotesis Penelitian

### 2.4.1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Teori *stakeholder* perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun memberikan manfaat bagi *stakeholder*, karena keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan para *stakeholder*. *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapat dukungan dari *stakeholder*, dengan adanya CSR merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan untuk membina

hubungan baik dengan pemerintah dengan membayar pajak. Jessica dan Toly (2014) berkata bahwa sulit sekali membedakan perusahaan yang melakukan CSR yang memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat atau hanya menjadi motif dalam melakukan Agresivitas Pajak. Apabila perusahaan melakukan celah tersebut untuk menghindari pajak, maka perusahaan dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial.

Dengan begitu semakin tinggi tanggung jawab perusahaan, maka semakin rendah perusahaan untuk melakukan perilaku agresivitas pajak. Sedangkan semakin rendah pengungkapan tanggung jawab perusahaan, maka semakin terindikasi perusahaan melakukan agresivitas pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha & W Meiranto, 2015) dan Sari, D., & Tjen, C. (2017) menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H1: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak penghasilan badan.

#### **2.4.2. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan**

##### **Badan**

Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif berbagai sumber pendanaan. Stabilitas keuangan perusahaan dan resiko gagal melunasi utang bergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan jumlah berbagai asset yang dimiliki perusahaan Subramanyam (2011). Tujuan dari struktur modal yaitu untuk

membuat perbandingan yang paling tepat dan paling menguntungkan antara utang dan modal usaha dari segi keuangan dan dari segi utang (Saerang, Tommy, Prasetia, 2014).

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan akan menentukan pendanaan melalui hutang untuk meringankan beban pajaknya. Kebijakan utang dan struktur modal adalah diskresi dari manager untuk menentukan pendanaan menggunakan utang atau modal yang tidak melibatkan investor pada pengambilan keputusan tersebut. Struktur modal menjadi salah satu celah bagi pengusaha untuk mengurangi nominal pajak dengan menjadikan pendapatan operasional sebagai beban perusahaan sehingga pembayaran pajak perusahaan tidak terlalu besar, semakin tinggi hutang suatu perusahaan, maka biaya bunga juga akan meningkat. Besarnya beban bunga dapat meningkatkan pengurangan pendapatan, sehingga pajak yang dibayarkan juga akan lebih kecil. Hamdi S (2018) menemukan bahwa Struktur Modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak

H2: Struktur modal berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak penghasilan badan.

#### **2.4.3. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan**

##### **Badan**

Biaya operasional merupakan biaya yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan, pengeluaran dari biaya operasional itu akan mempengaruhi pajak karena salah satu unsur yang dijadikan pengurang adalah biaya penjualan,

promosi, serta administrasi. Biaya operasional yang besar dapat juga menjadi indikasi besarnya ukuran dari perusahaan karena dalam biaya operasional menyangkut unsur biaya penyusutan untuk aktiva, biaya gaji tenaga kerja, serta biaya-biaya lain.

Menurut Jusuf (2009, h.38), Biaya operasional adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan perusahaan melainkan berhubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Biaya operasional perusahaan dapat menjadi penentu besarnya pajak penghasilan, karena beban operasional merupakan bagian dari pengurangan pajak penghasilan badan. Sehingga semakin tinggi biaya operasional maka akan semakin tidak agresif terhadap agresivitas pajak penghasilan badan. Christianti (2020) menemukan bahwa biaya operasional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak penghasilan badan.

H3: Biaya operasional berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak penghasilan.